

BAB V

PEMBAHASAN

A. Manajemen Hubungan Masyarakat di MTsN 8 Blitar

Hubungan masyarakat merupakan serangkaian alat untuk promosi sebagai penunjang bagian yang terpenting dalam meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan, dan memiliki fungsi manajemen yang berlangsung secara terus menerus dan dirancang melalui organisasi-organisasi masyarakat. Karena mulai dari aktivitas program hubungan masyarakat, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga tidak terlepas dari dukungan, serta kepercayaan citra positif dari masyarakat. Fungsi manajemen hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah lembaga yang diwakilinya dengan masyarakat sebagai sasaran pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh lembaga yang bersangkutan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Syaiful Sagala dalam bukunya

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi.¹

Hubungan masyarakat sebagai lembaga umumnya, hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak dapat dilakukan oleh pimpinan sendiri. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan masyarakat dirasa penting penyelenggaraan pendidikan.

¹ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan ...*, hal. 44.

Untuk itu MTsN 8 Blitar selalu menjalin kontak dengan pihak luar madrasah, mulai dari orang tua siswa, komite, tokoh masyarakat, alumni, pemerintah, sekolah-sekolah lain dan elemen masyarakat lainnya. Bukan hanya itu, manajemen hubungan masyarakat MTsN 8 Blitar juga berfungsi memperlancar arus komunikasi internal madrasah. Jaringan komunikasi internal sekolah sangat penting dalam rangka menunjang kegiatan madrasah.

Hasil temuan diatas, dalam penerapan fungsi manajemen yakni POAC yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *and controlling* (pengawasan/evaluasi), untuk membuat pengelolaan yang rapi dan teratur yang sesuai dengan teori George R. Terry,² yakni:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan berkaitan dengan penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan menjadi salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Aktifitas yang berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang ditentukan.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mengusahakan agar para anggota melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Semua anggota harus dimotivasi untuk segera melaksanakan rencana dalam aktivitas konkret yang diarahkan pada tujuan lembaga. Dengan selalu mengadakan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan pengawasan kepada anggota.

² U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). hal. 228-229.

4. Evaluasi (*Evaluating*)

Evaluating adalah proses pengawasan dan pengendalian performa madrasah untuk memastikan bahwa jalannya penyelenggaraan kegiatan disekolah telah sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.

Untuk menjalin Hubungan Masyarakat dengan masyarakat luar madrasah diperlukan perencanaan agar kegiatan manajemen hubungan masyarakat menjadi terarah. Perencanaan manajemen hubungan masyarakat eksternal di MTsN 8 Blitar melibatkan semua pihak yang terkait dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti kepala madrasah, guru, komite, siswa, dan masyarakat.

Perencanaan pengembangan sekolah perlu dirumuskan dengan jelas, baik dalam jangka panjang, menengah maupun dalam jangka pendek. Jangka penjang dapat dirumuskan dalam rencana strategik, yang mencakup: visi, misi tujuan, kebijakan, strategi, dan program untuk kurun waktu 5-10 tahun.³

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan manajemen hubungan masyarakat yaitu menumbuhkan keinginan dan kerelaan masyarakat untuk berpartisipasi dan menjalin kerjasama dengan madrasah dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh madrasah. Seperti yang diungkap oleh Mulyasa dalam bukunya yang berjudul standar kompetensi dan sertifikasi guru, yaitu :

Tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan manajemen hubungan masyarakat adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah, meningkatkan usaha orang tua siswa dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa

³ E. Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi aksara, 2017) hal 62

dalam kegiatan pendidikan sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah, pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah, dukungan serta bantuan dari masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah.⁴

Perencanaan dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan sebuah kegiatan, maka dari itu perencanaan adalah modal awal dari kegiatan manajemen hubungan masyarakat agar bisa lebih terarah dan tercapailah sebuah tujuan yang diinginkan dalam kegiatan manajemen hubungan masyarakat tersebut. Kegiatan manajemen hubungan masyarakat yang dilakukan MTsN 8 Blitar didasarkan pada adanya kesadaran untuk memenuhi kebutuhan akan adanya pendidikan yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan yang lain, madrasah memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan humas, diperlukan kerja sama antara semua anggota, proses ini disebut pengorganisasian. Seperti yang telah diungkapkan oleh Nanang dalam bukunya, yaitu :

Pengorganisasian adalah proses pembagi kerja dalam tugastugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikannya sumber daya, mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.⁵

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan yang diperlukan. Pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas

⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 3, hal. 178.

⁵ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan...*, hal. 71.

guna pengelolaan hubungan masyarakat agar tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya waka humas MTsN 8 Blitar tidak memiliki tim khusus untuk membantunya, akan tetapi pada setiap kegiatan yang dilakukan waka humas akan dibantu oleh guru, staf, serta pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Manajemen Hubungan Masyarakat dengan masyarakat pada intinya adalah komunikasi madrasah dengan masyarakat, kegiatan komunikasi yang dilakukan MTsN 8 Blitar dengan masyarakat sudah menjangkau sebagian besar elemen masyarakat. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan masyarakat di MTsN 8 Blitar telah membentuk semacam jaringan kerja yang cukup luas, melalui kegiatan bakti sosial, pertanggung jawaban dan evaluasi program madrasah, penyuluhan dari masyarakat dan bentuk komunikasi melalui surat dan telepon, serta tatap muka langsung, madrasah melakukan kerja sama dan menggugah masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kegiatan yang direncanakan. Pihak yang menjadi sasaran komunikasi dalam kegiatan tersebut yang dilakukan oleh MTsN 8 Blitar antara lain orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, komite.

Evaluasi dilakukan langsung oleh kepala madrasah atau waka humas. Evaluasi kegiatan manajemen hubungan masyarakat di MTsN 8 Blitar dilakukan dengan cara membandingkan program yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program tersebut. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, kepala madrasah sebagai penanggung jawab tertinggi akan melakukan tindakan koreksi bersama pihak-pihak terkait. Kepala madrasah

bertindak sebagai superviso dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh humas.

Hal ini sesuai dengan yang tulisan Binti dalam bukunya yaitu

Dalam bidang supervisi kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab memajukan pengajaran dengan melalui peningkatan profesi guru secara terus menerus.⁶

Standar yang digunakan untuk mengukur keefektifan kerja manajemen hubungan masyarakat adalah kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan.

B. Partisipasi Masyarakat Sekitar Madrasah di MTsN 8 Blitar

Dalam membangun sebuah kebersamaan dan komunikasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis, diperlukan keterbukaan madrasah terhadap masyarakat. Bentuk transparansi madrasah terhadap masyarakat adalah laporan berkala yang diberikan madrasah kepada komite dan orangtua siswa mengenai program-program kegiatan madrasah dan perkembangan perilaku dan kemampuan siswa. Selain itu, Transparansi diwujudkan melalui pengelolaan madrasah yang terbuka. Sedangkan untuk menjamin akuntabilitas madrasah terhadap masyarakat, MTsN 8 Blitar membuka diri untuk menerima saran, kritik, maupun ide-ide. Bentuk akuntabilitas madrasah terhadap masyarakat adalah kesediaan madrasah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan dengan program pendidikan yang sesuai.

⁶ Binti Maunah, *Supervisi Pendidikan Islam (Teori dan Praktek)*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 37

Hasbullah menyebutkan bahwa peran masyarakat terhadap sekolah⁷ adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah
2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat
3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung- gedung sekolah, perpustakaan, Aula dll
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Sekolah bisa melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian khusus seperti petani, pedagang, polisi, dokter dll

Dalam prosesnya, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti yang diungkapkan oleh Slamet dalam Rodliyah

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah :⁸

1. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh seorang wanita. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.

2. Usia

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia produktif juga sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam ikut serta meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi pendidikan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kualitas pendidikan.

4. Tingkat Penghasilan

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk

⁷ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu ...*, hal.100

⁸ Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat dalam ...*, hal. 56

berpartisipasi dalam pendanaan sekolah dan berinvestasi untuk kemajuan sekolah.

5. Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan untuk berpartisipasi, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh sekolah untuk membicarakan rencana program-program sekolah mulai dari jangka pendek, menengah sampai jangka panjang. Selain itu juga mempengaruhi kesanggupan masyarakat khususnya orang tua dalam menanggung biaya pendidikan anak.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, masyarakat juga berperan sebagai pengontrol, melalui laporan masyarakat kepada komite. Madrasah mengetahui kekurangan dan penyimpangan yang dilakukannya dalam pelaksanaan sebuah program. Jika laporan masyarakat tentang penyelenggaraan program pendidikan tersebut dianggap berat, komite sekolah melakukan rapat, komite melakukan rapat internal untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam menyikapi laporan tersebut.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, madrasah senantiasa melakukan pengelolaan yang transparan dan melakukan sosialisasi yang terarah dan terprogram kepada semua *stakeholder*.

Dengan adanya peran serta masyarakat dalam berbagai aspek mulai dari menjadi pembina kegiatan ekstra kulikuler, menjadi penyumbang dana dan material bangunan, dan sejumlah bentuk partisipasi lainnya, ini akan lebih menjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan antara madrasah dan masyarakat. Dengan begitu kualitas madrasah dimata masyarakat akan menjadi baik otomatis partisipasi masyarakat semakin meningkat.

C. Peran Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTsN 8 Blitar

Peran yang dilakukan oleh manajemen madrasah sudah terbilang baik, karena madrasah sendiri selalu melakukan upaya bagaimana selalu mengajak dan merangkul masyarakat dalam segala hal dan aspek kegiatan madrasah. Tidak hanya itu madrasah juga mempunyai program-program yang berhubungan dengan masyarakat, selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat agar hubungan antara madrasah dengan masyarakat selalu terjaga keharmonisannya. Karena madrasah sadar tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak akan tercapai secara maksimal. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Fuad Hasan dalam bukunya yaitu:

Masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Peran masyarakat itu antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non pemerintah (swasta), membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, membantu mengembangkan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Keberadaan manajemen hubungan masyarakat di suatu lembaga akan mempermudah lembaga itu sendiri untuk bersosialisasi dalam melaksanakan semua kegiatan yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Dalam melaksanakan program kegiatan manajemen hubungan masyarakat, madrasah menggunakan alat bantu dalam melakukan kegiatan.

Media merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga, terutama lembaga pendidikan. Media sebagai penunjang kegiatan manajemen

⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan...*, hal. 59

hubungan masyarakat di MTsN 8 Blitar diantaranya sebagai berikut: melaksanakan kegiatan istighosah dengan mengundang wali murid menjelang ujian nasional agar orang tua dapat berpartisipasi dalam untuk ikut mendoakan anak-anak mereka, adanya pondok pesantren, pembuatan brosur, kalender, kegiatan jalan sehat, mengundang wali murid dalam setiap kegiatan madrasah agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, silaturahmi antara guru orang tua alumni dan siswa.

Setiap kegiatan yang telah dilakukan pasti membutuhkan pengendalian (*controlling*) untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan lembaga pendidikan. Selain itu untuk mengetahui kekurangan serta hambatan apa yang dihadapi selama berlangsungnya kegiatan. Hal ini seperti yang telah ditulis oleh Daryanto dalam bukunya yang berjudul *Evaluasi Pendidikan*, yaitu :

Evaluasi dalam proses pengembangan sistem dimaksudkan untuk perbaikan sistem, pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat, serta penentuan tindak lanjut hasil pengembangan.¹⁰ Yaitu sebagai berikut :

a. Perbaikan sistem

Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena hasil penilaian dijadikan *input* bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan di dalam program pelaksanaan humas di lembaga pendidikan yang sedang dikembangkan. Disini, evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem tersebut karena evaluasi dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan.

¹⁰ Darryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (jakarta: rineka cipta, 1999) hal 16-17

b. Pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat

Selama, dan terutama pada akhir fase pelaksanaan pengembangan program humas dalam lembaga pendidikan, perlu adanya semacam pertanggung jawaban (*accountability*) dari pihak pelaksana kepada pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup, baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan sistem tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari sistem yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orangtua, petugas-petugas pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan sistem yang bersangkutan dalam sekolah.

c. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan

Tentang bagaimana langkah yang akan dilakukan setelah diadakannya evaluasi.

Evaluasi merupakan proses pengawasan dan pengendalian performa madrasah untuk memastikan bahwa jalannya penyelenggaraan kegiatan disekolah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan rencana maka perlu adanya perbaikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dituliskan oleh Mulyasa dalam bukunya, yaitu :

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar terjadi hubungan dan kerja sama yang baik antar sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, laporan tahunan.¹¹

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2005), hal. 50-51.

Kegiatan evaluasi di MTsN 8 Blitar dimaksudkan untuk menjaga kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan oleh bagian humas MTsN 8 Blitar dengan dua cara, yaitu: evaluasi langsung dan per empat bulan (sebelum semester gasal, setelah semester genap, dan menjelang kenaikan kelas). Yang melakukan evaluasi terdiri dari Kepala Madrasah dan Waka humas. Pelaksana kegiatan bidang hubungan masyarakat akan membuat laporan evaluasi kegiatan setiap kegiatan telah selesai. Dengan adanya evaluasi maka pelaksanaan lebih terarah dan terkontrol dengan baik.